

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2011-2016  
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA MALANG)**

**Nafi'ah A'mada, Hari Setiono, SE., M.Si, Nur Ainiyah, SE., M.Akt**

**Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit Mojokerto**

**Email : [mitho212katsuki@gmail.com](mailto:mitho212katsuki@gmail.com)**

**Abstract**

This study aims in finding out how the original Regional revenue (PAD) either simultaneously or partial influence on the Government's financial performance of Malang. This research uses data in the form of realization of the Budget Report of Malang from the years 2011-2016, published in the Agency's Asset and wealth management Areas (BPKAD) of Malang and [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). This research uses a quantitative approach (data in the form of numbers) that is the data analysis using a statistical regression model, with a double, and use statistical tests in the form of a t-test, f-test, and the coefficient of determination. And the results showed that the original Regional Revenue (PAD) simultaneously no significant effect on the financial performance with the significance of 0.164. While partially, local taxes and the result of the management of regional assets are separated does not effect financial performance. With each significance value of 0.194 and 0.078.

**Keywords:** Original Income Areas, Financial Performance

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan dalam mencari tahu bagaimana pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kota Malang. Penelitian ini menggunakan data berupa Laporan Realisasi Anggaran kota Malang dari tahun 2011-2016 yang dipublikasikan di Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (data berupa angka-angka) yaitu analisis data menggunakan statistik, dengan model regresi berganda, serta menggunakan uji statistik berupa uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan signifikansi sebesar 0,164. Sedangkan secara parsial, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan masing-masing nilai signifikansi sebesar 0,194 dan 0,078.

**Kata Kunci :** *Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan.*

**A. PENDAHULUAN**

Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (Halim dan Kusufi, 2012:101). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu sumber dana pembiayaan yang nyatanya belum mencukupi untuk memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, sehingga mengharuskan pemerintah daerah dalam menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai cara mewujudkan asas desentralisasi.

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan guna melihat sejauh mana pelaksanaan tugas suatu perusahaan atau organisasi telah dilakukan secara baik dan benar dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan (Fahmi, 2012:2). Menurut Mulyadi (2007:2) menjabarkan pengertian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik atas efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja Keuangan merupakan prestasi perusahaan yang dinilai berdasarkan kondisi keuangan yang dianalisis dengan beberapa tolak ukur seperti rasio dan indeks sehingga bisa menghubungkan dua data keuangan satu dengan yang lain.

Otonomi daerah ialah kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah adalah titik fokus penting guna memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah diselaraskan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan mengetahui potensi yang ada serta ciri khas dari daerahnya masing-masing.

Penelitian ini tujuannya menguji pengaruh-pengaruh Kinerja Keuangan sehingga observasi ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengevaluasi apakah terjadi penguatan teori pada observasi yang ada selama ini ataupun sebaliknya. Pengaruh yang diuji dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin memberi informasi yang berkaitan dengan penganggaran keuangan pemerintah apakah sudah berjalan dengan semestinya dan sumber PAD yang digunakan penelitian ini hanya pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga penelitian ini berfokus dalam mencari pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja keuangan dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi Kinerja Keuangan tersebut. Sehingga penelitian ini berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Malang Tahun 2011-2016".

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Teori Keagenan**

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan pihak manajemen sebagai agen. Teori keagenan dapat diterapkan juga dalam organisasi publik, pemerintah daerah yang berperan sebagai prinsipal merupakan pihak legislatif (perwakilan rakyat) dan agen merupakan pihak eksekutif (pemerintah daerah). Dalam kerangka pembuatan kebijakan, legislatif adalah prinsipal yang melimpahkan wewenang dalam membuat kebijakan baru kepada agen seperti pemerintah daerah atau panitia di legislatif. Hubungan keagenan yang terjadi disini yaitu setelah agen membuat suatu kebijakan dan berakhir saat usulan tersebut diterima atau ditolak oleh pihak prinsipal.

### **2. Hipotesis Penelitian**

#### **Pengaruh Pajak Daerah Pada Kinerja Keuangan**

Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio maka akan semakin baik) dalam hal melakukan pemungutan pajak daerah. Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2), Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa

imbangan langsung yang seimbang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

*H1* : adanya pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan

#### **Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Kinerja Keuangan**

Menurut Halim dan Kusufi (2012:104) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang menghasilkan penerimaan daerah merupakan sumber hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah sehingga mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Hasil perusahaan milik daerah merupakan keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang dipisahkan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Maka sifat perusahaan daerah adalah menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah menjadi suatu kesatuan produksi.

*H2* : adanya pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap Kinerja Keuangan

#### **Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Kinerja Keuangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pendapatan Asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali namun diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD merupakan salah satu tulang punggung utama pembiayaan daerah. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih diutamakan dibandingkan dengan sumber yang berasal dari selain PAD. Hal ini disebabkan karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Halim, 2004:36).

*H3* : adanya pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Kinerja Keuangan

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **1. Desain Penelitian**

##### **Jenis Desain atau Pendekatan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data diukur dalam suatu skala numerik dan merupakan data sekunder, yaitu cara memperoleh datanya secara tidak langsung atau melalui media perantara. Menurut Sugiyono (2010:31) penelitian kuantitatif merupakan analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini berupa statistik deskriptif.

##### **Sumber, Jenis, dan Data yang Digunakan**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Dimana data yang diperoleh tidak secara langsung memberikan datanya kepada peneliti. Tetapi peneliti bisa mendapatkan data tersebut melalui dokumen yang ada atau dari orang lain (Sugiyono, 2005:62). Dan data dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Malang yang telah dipublikasi di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

##### **Tempat penelitian**

Observasi ini dilakukan pada salah satu sektor publik yaitu Pemerintah Kota Malang.

## 2. Variabel dan Definisi Variabel

### Variabel Dependen (Y)

Tipe variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain disebut variabel terikat. Dimana variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan. Kinerja Keuangan diproyeksikan dengan tiga indikasi yaitu kemandirian, upaya fiskal dan desentralisasi fiskal. Dapat dikatakan mandiri jika semakin tinggi hasil Rasio Kemandirian maka semakin baik. Dengan kata lain ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Dan upaya fiskal di anggap berhasil jika hasil rasio upaya fiskal semakin tinggi, itu akan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan adanya perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan. Sedangkan penyelenggaraan desentralisasi dapat dikatakan mampu jika tingkat kontribusi PAD itu tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi Dan Pinjaman}}$$

$$\text{Rasio Upaya Fiskal} = \frac{\text{Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}$$

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

### Variabel Independen (X)

Tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain disebut variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas, yaitu : Pajak Daerah (x1) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (x2).

#### Pajak Daerah (X1)

Dalam penelitian ini variabel bebas (X1) ialah pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah.

#### Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2)

Dalam penelitian ini variabel bebas (X2) ialah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang digunakan untuk Modal utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat dan menjadi sumber pendapatan asli daerah.

## 3. Analisis Data

Jika data yang diteliti telah dikumpulkan oleh peneliti, maka yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana cara menganalisis data telah yang diperoleh. Langkah ini diperlukan sebab tujuan dari analisis data yaitu untuk membangun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah diperoleh (Bambang Prasetyo, 2005:170).

Observasi ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan memakai progam SPSS sebagai alat uji data tersebut. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap Kinerja Keuangan analisis yang digunakan ialah analisis regresi berganda.

Analisis data dalam observasi ini ialah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), dan untuk pengujian Hipotesis yaitu Uji t, Uji f, dan Koefisien Determinasi.

**D. Hasil dan Pembahasan**

**1. Statistik Deskriptif**

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	6	.87	2.31	1.8033	.51551
LG10_X1	6	10.81	11.57	11.2731	.26521
LG10_X2	6	9.96	10.26	10.1538	.10701
Valid N (listwise)	6				

**Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS 22**

Sesuai dengan tabel 1 menggunakan statistik terhadap pajak daerah menunjukkan nilai minimum 10,81 dan maksimum 11,57 dengan rata-rata pajak daerah sebesar 11,2731.

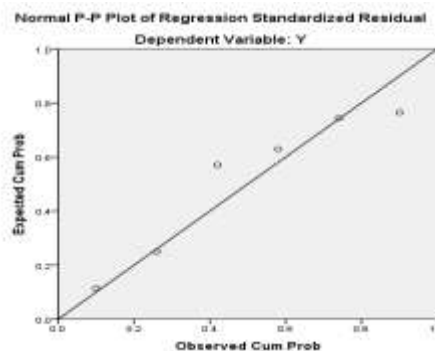
Sesuai dengan tabel 1 menggunakan statistik terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan nilai minimum 9,96 dan maksimum 10,26 dengan rata-rata Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan sebesar 10,1538.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap kinerja keuangan menunjukkan nilai minimum 0,87 dan maksimum 2,31 dengan rata-rata kinerja keuangan sebesar 1,8033.

**2. Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Gambar 1 Grafik Normal P-P Plot of Standardized Residual**



**Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS 22**

Berdasarkan hasil dari gambar 1 pengolahan data, maka didapatkan hasil bahwa semua data normal karena dari gambar plotting nampak dot atau titik pengambilan berada dekat dengan garis sehingga data bisa dikatakan normal karena sebaran mendekati garis pedoman atau diagonal.

**Uji Multikolonieritas**

**Tabel 2 Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
-------	---	------	--------------------------------------	-----

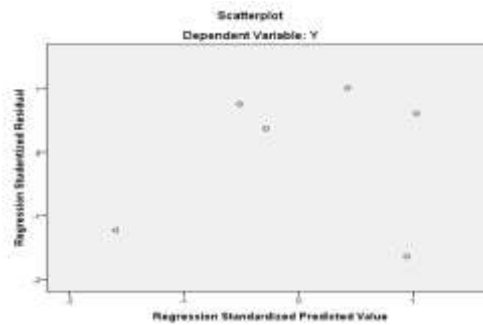
1	(Constant)	2.623	.079		
	LG10_X1	1.665	.194	.493	2.028
	LG10_X2	-2.632	.078	.493	2.028

**Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS 22**

Hasil dari tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* membuktikan tidak ada variabel bebas yang mempunyai nilai *tolerance* < 0,10 yang diartikan tidak menunjukkan korelasi antar variabel yang memiliki nilai > 95%. Hasil perhitungan VIF juga membuktikan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF > 10, jadi dapat diartikan tidak terdapat multikolonieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS 22**

Dari hasil gambar 2 terlihat titik-titik *Scatterplot* menyebar diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, hal ini bisa diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi ini layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.837 <sup>a</sup>	.700	.501	.36425	1.942

a. Predictors: (Constant), LG10\_X2, LG10\_X1  
b. Dependent Variable: Y

**Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS 22**

Berdasarkan tabel 3 dengan uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,942 dengan nilai dU yang diperoleh sebesar 1,5794. Dengan demikian diperoleh bahwa nilai DW sebesar 1,942 tersebut berada diantara dU yaitu 1,5794 dan 4-dU yaitu 4-1,5794 = 2,4206. Dengan demikian model regresi ini menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi.

**3. Pengujian Hipotesis**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
-------	-----------------------------	---------------------------

		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	43.317	16.515	
	LG10_X1	1.457	.875	.749
	LG10_X2	-5.706	2.168	-1.184

Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 43,317 + 1,457X_1 - 5,706X_2 + e$$

## Hasil Uji t

Tabel 5 Hasil Uji t

Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.623	.079		
	LG10_X1	1.665	.194	.493	2.028
	LG10_X2	-2.632	.078	.493	2.028

Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS 22

Berdasarkan tabel 5 bahwa  $t_{hitung}$  hasilnya 1,665 dengan nilai sig sebesar 0,194 , berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dimana nilai sig > 0,05 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,812 yang berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pajak Daerah yang menggambarkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Ini disebabkan karena pemungutan pajak yang dilakukan belum terperinci sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tabel 5 bahwa  $t_{hitung}$  hasilnya -2,632 dengan nilai sig sebesar 0,078 , berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dimana nilai sig > 0,05 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,812 yang berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang menggambarkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Ini disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum dikelola secara efisien, sehingga hasil yang didapatkan belum bisa mempengaruhi hasil kinerja keuangan.

## Hasil Uji f

Tabel 6 Hasil Uji f

Model		ANOVA <sup>a</sup>				Sig.
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	
1	Regression	.931	2	.465	3.507	.164 <sup>b</sup>
	Residual	.398	3	.133		
	Total	1.329	5			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), LG10\_X2, LG10\_X1

Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS 22

Berdasarkan hasil pada tabel 6 bahwa  $F_{hitung}$  hasilnya adalah 3,507 dengan nilai sig 0,164, sesuai dengan hasil tersebut dimana nilai sig  $> 0,05$  dan  $F_{tabel}$  sebesar 4,10 yang artinya  $F_{hitung} < F_{tabel}$  yang artinya bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga bisa diartikan bahwa pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah Kota Malang.

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.837 <sup>a</sup>	.700	.501	.36425	1.942

a. Predictors: (Constant), LG10\_X2, LG10\_X1  
b. Dependent Variable: Y

Sumber Data : Data Diolah Oleh SPSS 22

Berdasarkan hasil pada tabel 7 dapat dilihat nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,501 yang artinya 50,1% variasi atau perubahan dalam kinerja tidak dapat dijelaskan oleh variasi dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan karena hasil uji f tidak menunjukkan hasil signifikan, sehingga dalam penelitian ini tidak bisa menjelaskan kontribusi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan.

#### E. Kesimpulan dan Saran

##### Kesimpulan

1. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,665 < 1,812$ ) dan signifikansi menunjukkan angka  $> 0,05$ . Sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jadi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga dalam meningkatkan kinerja keuangan pajak daerah tidak ikut berkontribusi.
2. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-2,632 < 1,812$ ) dan signifikansi menunjukkan angka  $> 0,05$ . Sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Jadi penelitian ini menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga dalam meningkatkan kinerja keuangan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak ikut berkontribusi.
3. Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Malang, karena  $F_{hitung} < F_{tabel}$  ( $3,507 < 4,10$ ) dan signifikansi penelitian lebih dari 0,05 ( $0,164 > 0,05$ ). Jadi penelitian ini menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sehingga dalam meningkatkan kinerja keuangan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan tidak ikut berkontribusi.

##### Saran

1. Agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan tingginya Kinerja Keuangan maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melakukan perencanaan pemungutan pendapatan yang nilai realisasinya lebih besar dari target anggaran.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta kontribusi dalam pengembangan penelitian



khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan. Serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pembaca.

3. Diharapkan agar para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Kinerja Keuangan khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan seperti, sumber PAD yang lainnya karena peneliti hanya menggunakan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum lainnya. Selain itu penulis juga menyarankan untuk menambah hasil penelitian, menambah objek yang diteliti, juga menambah periode penelitian

#### F. Daftar Pustaka

Abduh, M. Al-Latief. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan *Fiscal Stress* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Wilayah Sumatera Bagian Utara. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*.

Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bloro. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Arikunto, S. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Bastian, Indra, 2000. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta

Batubara, Dian Nofrina. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19120/7/Cover.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2010).

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Indeks

Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Fokusmedia, Tim Redaksi. 2006. Undang-Undang Otonomi Daerah. Fokusmedia. Bandung

Halim, A., 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat.

\_\_\_\_\_, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN.

Halim dan Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.

Halim dan Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta. UUPP STIM YKPN

Julitawati, Ebit Dkk. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Syiah Kuala*. Banda Aceh

Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Jakarta 2010.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung

Sularso, Havid dan Restianto, Yanuar E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi. Vol. 1 (2): 109- 124.

Suprianto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Gorontalo*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Fokusmedia, Bandung.

Wahono. 2018. Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Universitas Lampung*.

Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Whittaker, James B. 1995. The Government Performance and Result Act of 1993: A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement, Educational Services Institut: Arlington, Virginia.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Yuliandriansyah. 2009. Otonomi Daerah dan Investasi. Artikel Online. (<http://yuliandriansyah.staff.uui.ac.id/2009/02/02/otonomi-daerah-dan-investasi/>, di- akses tanggal 21 Januari 2011)

Yusuf, M. Indrawan. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Hasanuddin Makassar*.